

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan kedudukannya sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat dan kelangsungan pembangunan. Seringkali dikatakan bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian dan sebagai penunjang pembangunan, maka dari itu penyempurnaan transportasi adalah mutlak dilaksanakan bukan hanya ditinjau secara sektoral akan tetapi transportasi yang efektif dan efisien sangat sangat diperlukan untuk melayani kegiatan transportasi di berbagai sektor ekonomi.

Kebijakan pembangunan transportasi diarahkan kepada penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran arus barang dan manusia dari tempat asal (point of origin) ke tempat tujuan (point of destination) (Rahardjo, 2014).

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tingkat perekonomian yang sangat dinamis sehingga setiap tahunnya jumlah pertumbuhan penduduknya mengalami peningkatan. Penambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan pertambahan volume pergerakan antar wilayah, sehingga meningkatkan volume lalu lintas pada ruas jalan. Hal tersebut sebagian besar terjadi pada beberapa ruas jalan penghubung antar kecamatan, jalan kolektor bahkan pada beberapa ruas jalan lokal. Kejadian peningkatan kemacetan lalu lintas terutama terjadi pada hampir seluruh ruas jalan utama di Kabupaten Tulungagung terutama pada jalan yang menghubungkan antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan (JKP-4) serta jalan penghubung dengan pusat-pusat kegiatan masyarakat (Permen PU No. 3 tahun 2012). Peningkatan jumlah volume kendaraan tersebut juga terjadi sejalan dengan bertambahnya lokasi-lokasi wisata di beberapa titik yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung. Saat ini hampir di setiap kecamatan bahkan di desa-desa

memiliki tempat wisata, baik yang diperuntukkan pengunjung lokal maupun dari luar daerah.

Dengan adanya peningkatan jumlah volume kendaraan dari tahun ke tahun yang kurang diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan yang ada, menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus segera diselesaikan. Permasalahan tersebut apabila dibiarkan akan menghambat aktivitas masyarakat terutama dalam bidang perekonomian dan pariwisata. Contoh dari permasalahan tersebut diantaranya kepadatan lalu-lintas bahkan memicu terjadinya kemacetan di beberapa titik pada ruas-ruas jalan penghubung antar kecamatan serta dengan semakin padatnya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan, dengan adanya hal ini akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan biaya operasional kendaraan, sehingga menurunkan tingkat efisiensi berkendara.

Oleh karena itu, pelebaran jalan pada saat ini sangat diperlukan, dengan tujuan mengurangi dampak kemacetan serta meningkatkan efektifitas waktu tempuh perjalanan. Mengingat keterbatasan anggaran pembangunan yang ada, sehingga pekerjaan pelebaran jalan di ruas Kabupaten Tulungagung juga terbatas pula pelaksanaannya. Selanjutnya harus dilakukan Prioritas Pemilihan Ruas Jalan yang dilakukan pelebaran, sehingga akan membantu pengambil keputusan untuk mengalokasikan dana yang terbatas tersebut kepada ruas jalan yang memang perlu di dahulukan penanganan pelebaran jalan. Dengan gambaran pada tahun 2016, 2017, 2018 Kabupaten Tulungagung mengalokasikan dana untuk pelebaran jalan sebesar Rp 38.380.3200.000, Rp 16.250.000.000, Rp 47.950.000.000. Anggaran tersebut sangatlah terbatas mengingat kabupaten Tulungagung memiliki 1024 ruas jalan di seluruh wilayah Tulungagung dengan lebar jalan kurang dari 6,5 meter adalah sebanyak 90% (SK Bupati Tulungagung tentang status ruas jalan). Untuk itu sangatlah diperlukan anggaran lebih banyak untuk kegiatan pelebaran jalan agar sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 yaitu untuk jalan lingkungan dan jalan yang mempunyai kelas jalan di atasnya disyaratkan memiliki lebar badan jalan minimal 6,5 meter.

Dalam mengatasi permasalahan penanganan pelebaran jalan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, maka harus ditentukan batasan-batasan yang meliputi besarnya anggaran yang dibutuhkan/dialokasikan, jadwal/waktu, lokasi kegiatan dan mutu/kinerja yang ingin dicapai. Permasalahan yang sering terjadi di Kabupaten adalah adanya keterbatasan anggaran/biaya dalam melaksanakan kegiatan pelebaran ruas jalan, yang mana jumlah ruas jalan yang harus segera ditangani tidak seimbang dengan dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan/ penentuan ruas jalan yang akan dilaksanakan pelebaran ruas jalan secara prioritas. Pemilihan ini tentunya membutuhkan kriteria dan cara yang tepat supaya kebijakan yang diambil tepat, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan alternatif dengan beberapa kriteria dapat dilakukan dengan berbagai metode antara lain dengan metode-metode Dominance, Feasible Ranges, Lexicography, Effectiveness Index ataupun Analytical Hierarchy Process (De Garmo dkk, 1984). Setiap metode mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan pemilihan metode yang akan diterapkan hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditangani.

Setiap tahun Pemerintah kabupaten Tulungagung mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang), bertujuan untuk meningkatkan pembangunan wilayah secara merata dengan program rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD kabupaten Tulungagung (Suryaradio.com, 2018) selain itu Musrenbang bertujuan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Tulungagung pada tahun berikutnya.

Untuk menentukan urutan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Tulungagung saat ini dilakukan berdasarkan usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung atau melalui permohonan usulan dari masing-masing wilayah mulai dari tingkat desa dengan menentukan kriteria anggaran dan teknis jalan. Namun

pemilihan kriteria-kriteria yang mempengaruhi urutan prioritas tersebut sementara masih sebatas kesepakatan pada forum Musrebang tersebut dan belum didasarkan pada metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga masalah urutan prioritas penanganan ruas jalan terutama pelebaran ruas jalan masih selalu menjadi hal yang belum dapat dipastikan.

Pemilihan alternatif mana yang harus dipilih, menjadikan suatu persoalan yang harus dipecahkan solusinya sehingga didapatkan alternatif-alternatif yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kegiatan prioritas yang harus segera dilaksanakan.

Dari uraian diatas perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan cara pengambilan keputusan dalam penanganan pelebaran ruas jalan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan efektif yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Untuk itu penggalan aspek dan kriteria yang dipakai dalam penelitian ini dapat mendukung pemilihan alternatif-alternatif yang akan ditentukan prioritasnya, salah satu metode yang sesuai dalam penentuan pemilihan prioritas dan urutan alternatif-alternatif adalah metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini juga dipakai pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai Analisis Prioritas Pemilihan Ruas Jalan yang diperlebar di Kabupaten Tulungagung.

Sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai penerapan metode AHP untuk penentuan alternatif pemilihan kegiatan pelebaran ruas jalan di Kabupaten Tulungagung, maka penelitian menggunakan metode AHP sangat perlu dilakukan.

## **1.2 Identifikasi Masalah.**

Dari uraian diatas dapat teridentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan volume kendaraan yang menyebabkan terjadinya kemacetan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Tulungagung.

2. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pelebaran jalan di Kabupaten Tulungagung.
3. Belum ada metode yang tepat dalam pengambilan keputusan untuk penentuan alternatif pemilihan kegiatan pelebaran ruas jalan di Kabupaten Tulungagung.

### **1.3 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dirumuskan untuk dijadikan bahan penelitian ini adalah :

1. Berapakah bobot aspek dan bobot kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan ruas jalan yang diperlebar?
2. Bagaimanakah urutan ranking ruas jalan di Kabupaten Tulungagung yang perlu untuk dilakukan pelebaran jalan?
3. Ruas jalan mana saja yang dapat dilakukan pelebaran berdasarkan batasan pagu anggaran tersedia?

### **1.4 Batasan Penelitian.**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Ruas jalan yang akan diteliti adalah ruas jalan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
2. Ruas jalan tersebut hanya terbatas pada ruas jalan antar kecamatan dan menghubungkan dengan pusat kegiatan masyarakat serta ruas jalan dengan fungsi jalan kolektor primer (JKP-4) dan masuk pada kelas jalan III dalam hal ini ruas jalan yang memiliki potensi kemacetan yang besar dan belum memenuhi standar minimum lebar jalan.
3. Studi hanya dilakukan pada ruas jalan di Kabupaten Tulungagung yang sudah seharusnya dilakukan pelebaran jalan, yaitu Ruas Jarakan - Wonorejo, Ruas Jetaan - Gebang, Ruas Bandung - Besuki, Ruas Bandung - Sodo, Ruas Podorejo - Tunggangri, Ruas Ngunut - Panjerejo.

4. Metode Analisa penelitian menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

### **1.5 Tujuan Penelitian.**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis guna mendapatkan besarnya bobot aspek dan kriteria yang dipertimbangkan dalam penentuan alternatif pelebaran ruas jalan di Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis urutan ranking alternatif ruas jalan di Kabupaten Tulungagung yang perlu untuk dilakukan pelebaran ruas jalan.
3. Menganalisis jumlah ruas jalan yang dapat dilakukan pelebaran berdasarkan anggaran yang tersedia.

### **1.6 Manfaat Penelitian.**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi awal bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan merumuskan metode yang tepat dalam pengalokasian dana pelebaran ruas jalan di Kabupaten Tulungagung.
2. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung dalam pengambilan keputusan secara teknis dan rasional untuk menentukan urutan prioritas ruas jalan yang harus segera dilakukan pelebaran.
3. Dapat memberikan informasi dan gambaran bagi mahasiswa terutama mahasiswa Manajemen Konstruksi tentang cara serta upaya untuk mengetahui cara yang tepat dalam pengalokasian dana pelebaran ruas jalan.
4. Sebagai acuan dalam penentuan proiritas ruas jalan yang akan dilakukan pelebaran dengan keterbatasan dana yang tersedia
5. Memberikan informasi kepada para pembaca terutama praktisi sebagai bahan referensi dalam penelitian lain.